

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Riview Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Atahau & Kausar (2022) yang berjudul *Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pengungkapan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam Asia Sustainability Report Rating. Populasi dalam studi ini mencakup seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar rating tersebut selama periode 2018 hingga 2020, dengan total 59 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah regresi. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan pada aspek ekonomi dan lingkungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan pada aspek sosial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.*

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2019) yang berjudul *Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengungkapan kinerja lingkungan dan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan dan pelaporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode*

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini dilakukan dengan memilih data penelitian sesuai dengan kriteria sampel sebanyak 17 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli tetapi melalui media perantara internet berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan referensi berupa buku-buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

Rahmawati (2021) telah membuktikan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang bergerak di subsektor perkebunan dan tercatat di BEI pada tahun 2017–2018. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 8 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Pengujian dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Amaliyah & Herwiyanti (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif korelasional dan menggunakan data sekunder dari situs BEI, dengan sampel 60 perusahaan tambang selama dua tahun pengamatan. Sampel dipilih melalui *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui software SPSS 22. Hasilnya

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara komite audit menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan demikian, komite audit memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Nuryono et al. (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, serta Kualitas Audit pada Nilai Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama 2015–2017. Sampel penelitian terdiri dari 63 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap nilai perusahaan (diukur dengan PBV), namun secara parsial, hanya kepemilikan institusional yang berpengaruh signifikan positif, sedangkan variabel lainnya tidak signifikan meskipun menunjukkan arah hubungan positif.

Sementara itu Irawati et al. (2021) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Industri Food and Beverages. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak struktur modal, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016–2020. Jenis penelitian

yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 51 data dari 13 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan walaupun arah hubungannya positif.

Keterbaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah Penelitian ini menawarkan keterbaruan dalam kajian pengaruh faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan, khususnya dengan memasukkan variabel *Sustainability Report* dan Ukuran Perusahaan sebagai bagian dari pengujian. Meskipun topik mengenai tata kelola perusahaan telah banyak dibahas sebelumnya, integrasi *Sustainability Report* bersama dengan peran Komisaris Independen, Komite Audit serta Ukuran Perusahaan dalam satu model penelitian masih tergolong terbatas, terutama di sektor perusahaan pertambangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data terbaru dan periode pengamatan yang lebih mutakhir dibandingkan penelitian terdahulu, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan lebih relevan dalam menjelaskan dinamika nilai perusahaan di tengah tuntutan transparansi dan keberlanjutan bisnis.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi juga memberikan tinjauan empiris atas peran pelaporan keberlanjutan sebagai salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan investor dan penguatan tata kelola perusahaan di era saat ini.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Legitimasi

Menurut Puspitaningrum & Indriani (2021) Teori legitimasi, yang diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975, menekankan pentingnya relasi antara perusahaan dan masyarakat. Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai faktor utama yang mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi, perusahaan perlu menjalin hubungan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitar. Bila perusahaan dinilai tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka legitimasi dapat hilang. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi penting agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar.

Darussalam & Farah (2024) Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa teori legitimasi menyediakan landasan konseptual untuk memahami alasan perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Sebuah entitas bisnis bisa mendapatkan legitimasi jika operasinya dianggap sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Keselarasan dengan norma sosial, harapan publik, aturan pemerintah, dan kelompok sosial lainnya memperkuat legitimasi tersebut. Teori ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakannya dengan norma sosial di lingkungan operasional. Sebagai kerangka teoretis, teori legitimasi menjadi dasar yang tepat untuk menganalisis variasi praktik pengungkapan dalam *Sustainability Report* seiring perkembangan isu keberlanjutan.

Teori legitimasi mendasari pengungkapan *Sustainability Report* dan berperan sebagai kerangka teoritis yang tepat untuk menganalisis serta

memahami perbedaan dalam praktik pengungkapan yang lebih luas. Kerangka ini mencakup berbagai aspek dan isu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan literatur terkait. (Darussalam & Farah, 2024). Teori legitimasi sangat berkaitan erat dengan *Sustainability Report*, karena keduanya menekankan pentingnya membangun reputasi perusahaan melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerbitkan *Sustainability Report*, perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat posisinya di mata publik. Komisaris independen dan komite audit merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang membantu perusahaan memperoleh legitimasi tersebut, karena keduanya mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian sosial. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, langkah ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif.

Hubungan antara teori legitimasi dengan komisaris independen dan komite audit sangatlah penting. Kedua elemen tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung perusahaan dalam memperoleh legitimasi yang diharapkan. Dengan keberadaan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis serta selaras dengan kepentingan publik. Selain mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan juga berupaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Reputasi

yang baik dan keandalan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

2. *Agency Theory*

Dalam teori agensi (*agency theory*) dijelaskan tentang hubungan keagenan. (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa Dalam pandangan teori agensi, perusahaan dipandang sebagai kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya (prinsipal) dan pengelola (agen) yang bertugas mengelola serta mengendalikan aset tersebut. Teori ini menjelaskan pemisahan antara peran kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham dan fungsi manajerial yang dijalankan oleh manajer. Hubungan agensi terjadi ketika pemilik modal memberikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan atas nama mereka. (Wongso, 2012). Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Menurut Suseno 2012 dalam Irawan & Kusuma, (2019) teori agen menjelaskan interaksi antara manajemen dan pemegang saham, di mana manajer memiliki informasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan investor. Ketimpangan informasi ini sering kali memunculkan masalah keagenan (*agency problems*), yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil dan menimbulkan konflik kepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan Teori Agen, ukuran perusahaan yang besar meningkatkan potensi konflik antara manajemen dan pemilik akibat meningkatnya kompleksitas dan keterbatasan pemantauan langsung. Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk memiliki mekanisme pengawasan dan pengungkapan yang lebih baik untuk mengurangi konflik keagenan dan biaya

keagenan yang timbul. Jika manajemen dalam Perusahaan memiliki konflik di dalamnya, secara tidak langsung konflik tersebut akan mempengaruhi nilai Perusahaan itu sendiri

3. *Sustainability Report*

Berdasarkan peraturan OJK (2021) laporan keberlanjutan adalah dokumen yang berisi informasi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dari Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, serta perusahaan publik terkait praktik bisnis berkelanjutan. Laporan ini memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi investor, dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Menurut Porter dan Karmar Dalam Darussalam & Farah (2024) Laporan Keberlanjutan kini dianggap sebagai paradigma baru yang menggantikan pendekatan bisnis tradisional. Dulu, bisnis hanya menitikberatkan pada satu aspek, yaitu Profit yang tercermin dalam laporan keuangan. Namun saat ini, bisnis mengadopsi konsep *Triple Bottom Line* atau 3P, yang mencakup *People* (sosial), *Environment* (lingkungan), dan *Profit* (ekonomi). Ketiga aspek ini menjadi dasar utama dalam menilai keberhasilan perusahaan dan harus diintegrasikan dalam strategi perusahaan guna menciptakan keunggulan kompetitif.

Tren penggunaan Laporan Keberlanjutan yang semakin berkembang ini juga didorong oleh semakin banyaknya pedoman yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan industri. Salah satu pedoman yang banyak digunakan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI adalah sebuah organisasi internasional yang independen yang membantu perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk memahami dan menyampaikan dampak dari kegiatan mereka terhadap isu-

isu keberlanjutan. Dalam penelitian ini, aspek lingkungan dan ekonomi menggunakan indikator yang sesuai dengan pedoman GRI, sedangkan aspek sosial merupakan kombinasi dari praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia (HAM), keterlibatan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap produk. (Darussalam & Farah, 2024). Menurut Tjahjadi et al. (2021), GRI (1997) menyatakan bahwa untuk mencapai keberlanjutan perusahaan, kepercayaan harus dijaga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *Sustainability Report* menggunakan pedoman GRI G-4 yang mencakup 91 item. Berdasarkan GRI G4 *Guidelines*, *Sustainability Reporting* meliputi tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Ekonomi: Dimensi ini berfokus pada dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap para pemangku kepentingan serta pengaruhnya terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
- b. Lingkungan: Dimensi ini mencakup dampak organisasi terhadap sistem alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem.
- c. Sosial: Dimensi ini membahas dampak organisasi terhadap sistem sosial tempat organisasi tersebut beroperasi. (Darussalam & Farah, 2024).

4. Komisaris Independen

Menurut Arifah & Nazar (2020) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung pada emiten. Mereka juga tidak terafiliasi atau memiliki hubungan bisnis dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Peran utama komisaris independen adalah sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan, yang bertugas memastikan strategi perusahaan

dijalankan secara optimal dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Wahyudin et al. (2020) Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari internal perusahaan dan memenuhi ketentuan sebagai komisaris independen. Minimal 30% dari total anggota dewan komisaris harus berasal dari kalangan independen.

Tugas utama komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, serta meminimalkan konflik keagenan dengan mengawasi kinerja manajemen. Keberadaan mereka juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengendalian risiko perusahaan.

5. Komite Audit

Saifi & Hidayat Dalam Amaliyah & Herwiyanti (2019) mengatakan Komite Audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam pengawasan jalannya perusahaan. Komite ini minimal terdiri dari tiga orang, dengan ketua berasal dari komisaris independen dan anggota lainnya dari pihak luar yang independen serta memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau keuangan.

Komite Audit memainkan peran sentral dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Tugas mereka meliputi pemberian opini profesional secara

independen kepada dewan komisaris atas laporan yang disusun oleh direksi, meninjau isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus, serta mengawasi proses pelaporan keuangan, audit eksternal, dan sistem pengendalian internal perusahaan.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada skala besar kecilnya entitas bisnis yang biasanya diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Ukuran ini juga dapat ditentukan berdasarkan besarnya ekuitas atau struktur organisasi perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki biaya keagenan yang tinggi, sehingga mereka terdorong untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih menyeluruh guna menurunkan biaya keagenan tersebut. (Nuryono et al., 2019).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik fundamental yang mencerminkan besar kecilnya suatu entitas bisnis, yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan nilai perusahaan karena perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, efisiensi operasional, dan daya saing.

7. Nilai Perusahaan

Menurut Liu & Zhang Dalam Amaliyah & Herwiyanti (2019) mengatakan Nilai perusahaan mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memberikan keuntungan kepada para pemangku kepentingan di bawah pengelolaan manajemen dan kerangka hukum yang berlaku. Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai jika terdapat sinergi antara manajemen, pemegang

saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan keuangan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan modal.

Dengan demikian, proses ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, yang dikenal sebagai masalah keagenan. Dalam situasi tersebut, manajer berpotensi bertindak untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemegang saham.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Sustainability Report* Terhadap Nilai Perusahaan

Teori yang mendukung hubungan antara *Sustainability Report* terhadap Nilai Perusahaan adalah Teori legitimasi. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum & Indriani (2021) mengatakan Teori legitimasi yang diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan guna memperoleh legitimasi sosial yang memungkinkan keberlangsungan operasionalnya.

Dalam penelitian S. A. Putri et al. (2024) mengatakan membangun relasi yang positif dengan pemangku kepentingan melalui pengungkapan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik investor terhadap saham perusahaan. Ketika saham semakin diminati dan diperdagangkan pada harga yang lebih tinggi, maka nilai perusahaan pun ikut mengalami peningkatan.

Artinya, keberadaan *Sustainability Report* berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, pengungkapan keberlanjutan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan investor. Hal ini juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja jangka panjang. Melalui pelaporan yang terbuka dan akuntabel, perusahaan menunjukkan kepedulian tidak hanya pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Transparansi ini memperkuat hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, konsumen, dan masyarakat luas.

H₁: *Sustainability Report* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Teori yang mendukung hubungan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan adalah Teori legitimasi. Menurut Puspitaningrum & Indriani (2021) mengatakan Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), teori legitimasi memandang bahwa interaksi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat merupakan faktor kunci untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan perlu memperoleh penerimaan dari publik agar dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberadaan Komisaris Independen memiliki peranan strategis, karena mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak internal saja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Komisaris Independen berfungsi sebagai penjaga nilai transparansi dan akuntabilitas

perusahaan, yang penting untuk membangun reputasi positif di mata publik dan menjaga legitimasi sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Badruddien Dalam Wahyudin et al. (2020) mengatakan Lebih lanjut, keberadaan Dewan Komisaris Independen terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan peran mereka yang strategis dalam memastikan setiap keputusan penting perusahaan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan independensi yang dimiliki, Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan dan mendorong pengelolaan yang lebih transparan serta akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki citra perusahaan di pasar, mengurangi risiko, dan meningkatkan stabilitas finansial. Sebagai akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Nilai Perusahaan.

H₂: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Dalam penelitian Puspitaningrum & Indriani, (2021) mengatakan Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk memperoleh penerimaan dan pengakuan sosial, perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Komite Audit memiliki peran vital sebagai instrumen tata kelola yang memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan dan pengelolaan risiko, Komite Audit menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Soedarman et al. (2024) mengatakan Kualitas dari komite audit ditentukan oleh tingkat transparansi yang dihadirkan dalam laporan pertanggungjawaban manajemen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Komite ini juga bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan para pemegang saham melalui pengawasan terhadap praktik manajemen perusahaan. Octaviani, (2023) juga menyatakan menyatakan bahwa Komite audit yang efektif mampu memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan melalui pengelolaan yang baik di bidang keuangan dan akuntansi, serta dengan memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip yang etis untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan.

Keberadaan Komite Audit yang independen dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Hal ini membantu perusahaan memperoleh legitimasi sosial, karena masyarakat akan melihat bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai akibatnya, perusahaan dapat menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan.

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor karakteristik internal yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mengakses sumber daya, membangun jaringan bisnis, serta merespons perubahan dinamika pasar. Dalam perspektif teori agensi, perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal cenderung meningkat. Untuk meminimalisasi ketimpangan informasi (information asymmetry) yang mungkin terjadi, perusahaan besar cenderung lebih terdorong dalam menerapkan praktik pelaporan yang lebih terbuka dan akuntabel guna memperoleh kepercayaan dari investor maupun pemangku kepentingan lainnya. (Jensen & Meckling, 1976).

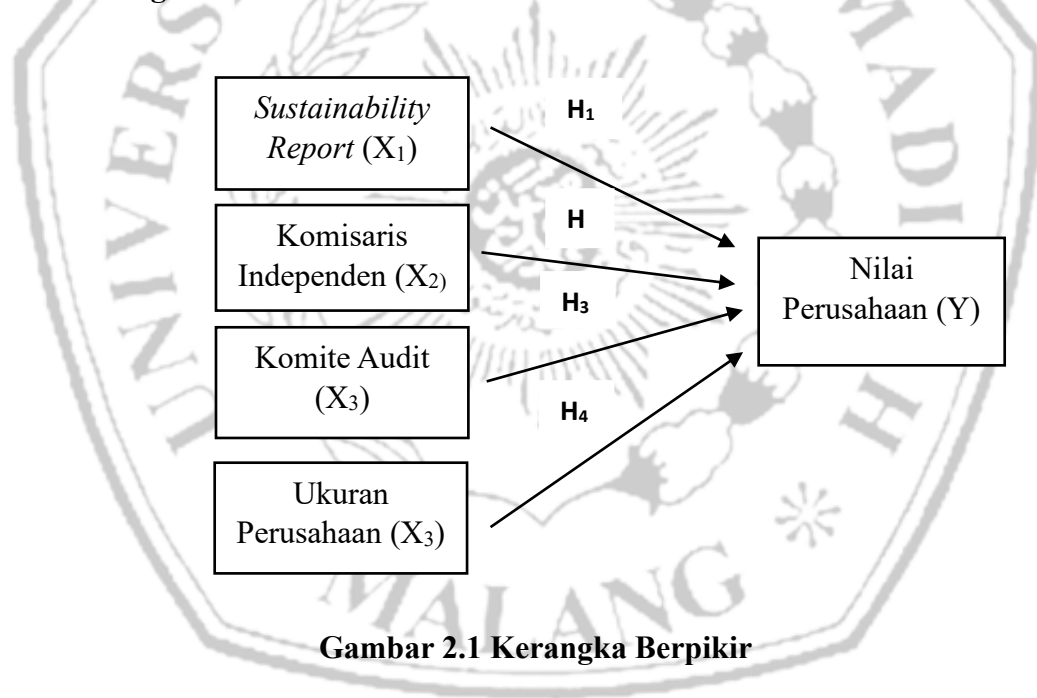
Penelitian yang dilakukan oleh Irawati et al. (2021) mengatakan Selain itu, perusahaan dengan skala yang besar biasanya memiliki tingkat risiko bisnis yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar dalam menghadapi tekanan persaingan, serta dukungan sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur. Perusahaan besar juga umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya dan risiko operasionalnya. Hal itu juga sejalan dengan penelitian Hirdinis dalam Irawati et al. (2021) yang menyatakan, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula volume penjualan dan total aset yang dimiliki. Dengan kondisi tersebut, perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar (eksternal). Hal ini menjadikan

perusahaan berukuran besar lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan atau investor dalam hal pendanaan dan ekspansi usaha.

Sejalan dengan pandangan tersebut, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memperoleh perhatian dari pasar, menjaga reputasi, serta menunjukkan kinerja yang stabil. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat persepsi investor terhadap nilai perusahaan dan dengan sendirinya nilai perusahaan juga akan mengalami kenaikan.

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir